

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengemukakan teori-teori, hasil penelitian orang lain, dan publikasi umum yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian. Adapun kajian pustaka yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Penerapan *Good Corporate Governance*

2.1.1.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Kata *governance* berasal dari bahasa Perancis *gubernance* yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut diergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Jadi pada dasarnya *good corporate governance* adalah suatu system (*Input, process, output*) dan seperangkat perautran yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang sahan, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Di Indonesia, konsep *corporate governance* diperkenalkan secara resmi pada tahun 1999 ketika Pemerintah membentuk Komite Nasional tentang *Corporate Governance*. Sebagaimana halnya di Negara-negara lain di dunia, komite ini melahirkan kode *corporate governance*, yang kemudian direvisi pada tahun 2006. Kode ini ditasbihkan sebagai referensi seluruh perusahaan Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

Banyak para ahli memaparkan apa itu definisi dari *good corporate governance*, salah satunya adalah sebagai berikut :

Menurut Sutedi (2012:1), *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai:

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Sedangkan menurut Forum *Corporate Governance* Indonesia (FCGI) (2001:22):

“*Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Tunggal (2011:156):

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik *good corporate governance* dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002 Pasal 1 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian *good corporate governance* berdasarkan keputusan ini adalah :

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya berlandaskan peraturan perundang-undangan dengan nilai etika.”

Yang dimaksud organ disini adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), komisaris dan direksi untuk perusahaan perorangan (persero) dan pemilik modal, dewan pengawas dan direksi untuk perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan), sedangkan *stakeholders* adalah pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMN, baik langsung maupun tidak langsung, yaitu pemegang saham maupun pemilik modal, komisaris maupun pengawas, direksi dan karyawan serta pemerintah, kreditur dan pihak yang berkepentingan.

Dari beberapa definisi teori yang diberikan diatas dapat dijelaskan bahwa *good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan kepentingan intern dan ekstern perusahaan baik hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder*. *Good corporate governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan

masyarakat. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan semaksimal mungkin, sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

Indikator penilaian *good corporate governance* adalah seluruh perusahaan yang menerapkan GCG serta masuk daftar pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* hasil survey *Indonesian Index Corporate Governance (IICG)* dan majalah SWA yaitu terdiri dari penilaian: *Self Assesment*, Dokumen, Makalah dan Observasi (Gabriela Cynthia:2013).

2.1.1.2 Sejarah *Good Corporate Governance*

Kesadaran mengenai perlu adanya *corporate governance* mulai tumbuh di Inggris tahun 1992, ditandai dengan dikeluarkannya peraturan tata kelola perusahaan oleh *Bank of England* dan Bursa London yang diketuai oleh *Sir Adrian Cadbury*. Setelah itu penerapan *good corporate governance* mulai menyebar ke Eropa, Amerika dan Australia.

Pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemilik telah lama dikenal dalam *Agency Theory* atau *Stewardship*. Kemudian dikembang dalam teori Birokrasi Weber (dikutip oleh Media Akuntansi 2000). Dalam sejarah peradaban dunia bisnis. GCG sudah dipraktikkan di lingkungan perusahaan-perusahaan di Amerika kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, agar perusahaan mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola suatu Negara (*Little Republic*). Oleh karena itu, seringkali perusahaan disebut

suatu miniatur Negara. Pola GCG kemudian diikuti oleh Negara-negara di Eropa hingga seluruh dunia (Yada Braguna, 2000).

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri secara eksplisit muncul pertama kali pada tahun 1984 Robert I. Tricker, memandang *corporate governance* mengemukakan *Agency Theory* adalah salahsatu teori yang dapat menggambarkan *corporate governance*. Perusahaan ditampilkan sebagai suatu kontrak antar pemilik dan dimana pemegang saham sebagai pemilik dan para ditekur sebagai agennya. *Agency Theory* menyatakan bahwa agen dalam hal ini akan bekerja sehendak dirinya secara rasional, bukan dengan bijaksana dan asumsi lainnya seperti yang terdapat dalam model *stewardship*.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih bagus karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Negara Indonesia mulai mengadopsi penerapan *good corporate governance* setelah adanya krisis pada taun 1999 dengan dibentuknya sebuah lembaga bernama Komite Nasional *On Corporate Governance* pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui surat Keputusan Menko Ekuin Nomor: Kep. 10/M. EKUIN/08/1999.

2.1.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Pendirian suatu organisasi sudah tentu ada tujuan yang hendak dicapai. Apalagi menyangkut organisasi bisnis yang pastinya ada peluang untuk meraup keuntungan dari usahanya tersebut. Selanjutnya semua itu tentuang dalam visi dan misi perusahaan. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan usaha yang akan dilakukannya. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram ini dapat tercapai dengan keberadaan sistem tatakelola perusahaan yang baik GCG (*Good Corporate Governance*).

Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 prinsip *good corporate governance*, merupakan :

“Kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat”.

Menurut Achmad (2005:9), prinsip dasar *good corporate governance* (GCG) terdiri atas :

- A. Transparansi (*Transparency*).
- B. Akuntabilitas (*Accountability*).
- C. Responsibilitas (*Responsibility*).
- D. Independensi (*Independency*).
- E. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*).

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut:

A. *Transparency* (Keterbukaan)

Secara sederhana bias diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholdernya*. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan

pengelolaan perusahaan. Audit yang dilakukan atas informasi dilakukan secara independen. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bias dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Kemudian, karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar.

Jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

B. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara

efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- a. Praktik audit internal yang efektif, serta
- b. Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan.
- c. Bila prinsip akuntabilitas ini diterapkan secara efektif, maka kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi benturan kepentingan peran.

C. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa

dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholder*-lainnya.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Diluar hal itu, lewat prinsip *responsibility* ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

D. *Independency* (Kemandirian)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara professional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan.

Untuk meningkatkan *Independency* dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman dan praktik ditingkat *corporate board*, terutama ditingkat dewan komisaris dan direksi yang oleh undang-undang didaulat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

E. *Fairness* (Kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam perusahaan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak lain.

Fairness diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara jujur dan adil. *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan terhadap praktik korporasi yang merugikan seperti disebutkan diatas. Dengan kata lain *fairness* menjadi jiwa untuk memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara Beragam kepentingan dalam perusahaan.

Prinsip-prinsip GCG diatas ini menyarankan perusahaan dalam menjalankan aktivitas agar memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan. Kesetaraan maksudnya adalah sebuah perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyatakan pendapatnya demi kepentingan perusahaan dan perusahaan harus memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pekerja tanpa diskriminasi.

2.1.1.4 Pihak Yang Berperan Dalam *Good Corporate Governance*

Pengelolaan perusahaan (*corporate governance*) itu sendiri dapat didefinisikan secara luas dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara Manajer, Direktur dan Pemegang Saham. Sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efisien, menghasilkan keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Menurut YPPMI (2002:23), struktur umum suatu perusahaan berbentuk PT di Indonesia, adalah :

- a. Komite Audit
- b. Komisaris
- c. Direksi

Uraian mengenai kutipan diatas adalah sebagai berikut :

A. Komite Audit

Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap fungsi pelaksanaan direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan.

Komite Audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen, independensi Komite Audit tidak dapat dipisahkan integritasnya. Hal ini perlu

disadari karena Komite Audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris dengan *internal auditor*.

B. Komisaris

Komisaris harus mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi mengenai penyelenggaraan perusahaan. Komisaris berdasarkan UU PT diharuskan, dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab, untuk melaksanakan tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan hukum Komisaris ataupun RUPS diberi wewenang untuk menskors (memberhentikan sementara) anggota Direksi. Komisaris sama-sama dengan Direksi, harus menandatangani laporan tahunan perusahaan. Dengan demikian, turut bertanggung jawab secara hukum atas laporan keuangan yang menyesatkan yang karenanya menyebabkan kerugian kepada pihak manapun. Setiap anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan UU PT, setiap kepentingan kepemilikan saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dalam perusahaan tersebut atau perusahaan-perusahaan lainnya. Namun, pelaksanaan tanggung jawab Komisaris tersebut hingga kini dinilai sangat langka.

C. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Direksi diharuskan oleh UU PT untuk menjalankan, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota secara pribadi bertanggung jawab atas

penyimpangan atau kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Direksi wajib mengadakan pembukaan perusahaan, mempersiapkan dan mengajukan kepada RUPS tahunan suatu laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan disamping mengadakan dan memelihara daftar Pemegang Saham serta Risalah RUPS. Seorang anggota Direksi juga harus mengungkapkan kepada perusahaan, berdasarkan pasal 87 UU PT, setiap kepentingan pemegang saham yang dipegang olehnya atau keluarganya dan perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain. Direksi berkewajiban mematuhi Pasal 34 UU PT yang mengharuskan perusahaan menyelenggarakan dan memelihara daftar.

Pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham para anggota Direksi dan Komisaris serta keluarga mereka didalam perusahaan tersebut dan atau di perusahaan-perusahaan lainnya berikut pencatatan tanggal saham-saham itu diperoleh atau dilepaskan. Direksi wajib menyediakan daftar pemegang saham pada kantor perusahaan. Menurut peraturan-peraturan yang berlaku suatu perusahaan yang terdaftar di bursa saham diharuskan untuk mengangkat seorang *corporate secretary*, dimana *corporate secretary* tersebut bertugas sebagai penghubung investor (*investor relation office*). Disamping itu, juga sedang diusulkan dimana *corporate secretary* juga bertindak sebagai petugas ketaatan (*compliance officer*) dan pemegang dokumen-dokumen perusahaan seperti Daftar Pemegang Saham serta Daftar Khusus perusahaan, termasuk pula risalah rapat setiap RUPS. Salah seorang anggota Direksi dapat ditunjuk sebagai *corporate secretary*.

2.1.1.5 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

2.1.1.5.1 Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki andil yang besar dan manfaat yang bias membuat perubahan positif bagi perusahaan baik dikalangan investor, pemerintah maupun masyarakat umum. Penerapan GCG pada haikakatnya meruakan suatu bentuk *change management* yang signifikan di perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan GCG yang cenderung pada aspek *compliance* perlu duramu sedemikian rupa menggunakan pendekatan *change management*, agar perubahan ini dapat menjadi bagian tak terpisahkan dari *corporate culture*. Hal ini memunculkan fenomena perlunya *change management* dan GCG dipadu padankan agar menjadi *corporate culture*.

Menurut Achmad (2005:4) manfaat dari penerapan GCG bagi perusahaan adalah :

“Diyakini akan menolong perusahaan dan perkeonomian suatu Negara yang sedang tertimpa krisis bangkit menuju kearah yang lebih sehat, mampu bersaing, dikelola secara dinamis serta professional.Ujungnya adalah daya saing yang tangguh yang diikuti oleh pulihnya kepercayaan investor”.

Manfaat penerapan *good corporate governance* dalam pedoman *Good Corporate Governance* (2006:2) adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan perusahaan.
- b. Memberikan keyakinan bahwa perusahaan dikelola secara baik dan benar agar dapat memberikan hasil yang wajar dan bernilai tinggi sehingga memiliki daya saing dan daya tahan yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- c. Mendorong pengelolaan perusahaan secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.

- d. Mendorong pengelolaan resiko dan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif.
- e. Mendorong agar setiap unsur pimpinan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan, dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perusahaan terhadap *stakeholders*.
- f. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
- g. Mencegah terjadinya pengimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Sedangkan menurut IICG (2009), keuntungan yang bias diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep *good corporate governance* adalah :

- 1. Meminimalkan *agency cost*.
- 2. Meminimalkan *cost of capital*.
- 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.
- 4. Mengangkat citra perusahaan.

Berikut ini adalah uraian dari manfaat penerapan GCG :

- 1. Meminimalkan *agency cost*.

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-biaya ini bias berupa keurgian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

- 2. Meminimalkan *cost of capital*.

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus dtanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman,

selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk perusahaan akan menjadi lebih kompetitif.

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan.

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey yang dilakukan oleh Russel Reynolds Associates (1977) mengungkapkan bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli saham perusahaan tersebut.

4. Mengangkat citra perusahaan.

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khususnya para investor. Citra (*image*) suatu perusahaan kadang kala akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut.

Jadi pada intinya, banyak manfaat dari penerapan *good corporate governance* bagi perusahaan-perusahaan swasta maupun pemerintah, antara lain :

- Mempertahankan kesinambungan perusahaan.
- Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar.
- Mengurangi *agency cost* dan *cost of capital*.
- Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada para pemangku kepentingan.

- Melindungi organisasi dari intervensi politik dan tuntutan hukum.
- Membantu terwujudnya *good corporate citizen*.
- Memetakan masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG.

Manfaat dari penerapan *good corporate governance* tentunya sangat berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam rangka panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Selain bermanfaat meningkatkan citra perusahaan di mata para investor, hal ini tentunya menjadi nilai tambah perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

2.1.1.5.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan dari *Good Corporate Governance* menurut Widjaya (2011:34) adalah :

1. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.
2. Aktiva perusahaan dijaga dengan baik.
3. Perusahaan menjalankan praktik-praktik bisnis yang sehat.
4. Keigatan-kegiatan perusahaan dilakukan dengan transparan.

Sedangkan penerapan *good corporate governance* dilingkungan BUMN dan BUMD mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2001 pada pasal 4 yang dalam Hery (2010:53), yaitu :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisiensi, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemadnirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
- d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
- e. Meningkatkan iklim investasi nasional.
- f. Mensukseskan program privatisasi.

Sedangkan menurut Eka (2011) tujuan dari *good corporate governance* adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan kinerja perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *board of directors* dengan manajemen perusahaan.

Jadi pada intinya, tujuan *good corporate governance* adalah penerapan sistem GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan dalam jangka panjang serta bagaimana melindungi para pemegang saham dan pengelola perusahaan atau manajemen perusahaan. Serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja serta manajemen dalam organisasi, kemudian peningkatan kualitas hubungan antara *stakeholders* dengan manajemen perusahaan.

2.1.1.6 Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme GCG merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan control atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme GCG diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi.

Menurut Debby (2013), bahwa:

“Mekanisme *good corporate governance* pada dasarnya mencakup beberapa hal yakni kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi serta komisaris independen”.

Berikut ini penjelasan mengenai mekanisme *good corporate governance*:

1. **Kepemilikan Manajerial**

Pengertian kepemilikan manajerial menurut Marcus, Kane, dan Bodie (2006) adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer.”

Menurut Melinda dan Bertha (2008) pengertian kepemilikan manajerial adalah:

“Presentase suara yang berkaitan dengan saham dan *option* yang dimiliki oleh manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan, hal ini dikarenakan kepemilikan manjer yang bersifat internal.”

Sedangkan menurut Gibson (2003) pengertian kepemilikan manajerial adalah:

“Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.”

Dari beberapa definisi diatas, maka disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang diukur dari presentase jumlah saham manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat menekan masalah keagenan dan semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri dengan mengurangi resiko keuangan pperusahaan melalui penurunan tingkat hutang.

2. Kepemilikan Institusional

Pengertian Kepemilikan Institusional menurut Widarjo (2010:25) sebagai berikut :

“Kepemilikan Institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing.”

Menurut Faisal (2004), kepemilikan institusional merupakan :

“Pihak yang memonitor perusahaan. Dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasikan kemampuan untuk memonitor manajemen lebih besar. Artinya semakin besar kepemilikan institusi maka semakin efisiensi pemanfaatan aktiva perusahaan sehingga dapat mencegah tindakan pemborosan yang dilakukan manajemen dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.”

Sedangkan menurut Thesarani (2016), menyatakan bahwa:

“Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pension dan *investment banking*.”

Dari ketiga definisi dari Widarjo (2010:25), Faisal (2004) dan Thesarani (2016) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun.

Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Winanda, 2009).

3. Komisaris Independen

Menurut Tunggal (2009:79), menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Komisaris independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut:

“komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dari pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menajalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) komisaris independen adalah sebagai berikut :

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan ketiga definisi diatas dari Tunggal (2009:79), Agoes dan Ardan (2014:110) serta Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) , dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

4. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi adalah ukuran (jumlah) dewan direksi pada sebuah perusahaan. Dimana dewan direksi (direktur) merupakan seseorang yang ditunjuk untuk memimpin sebuah perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan direksi tersebut

kemudian menimbulkan pertanyaan, berapa banyak dewan yang dibutuhkan dalam perusahaan? Apakah dengan semakin banyaknya dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dan direksi? Jumlah dewan direksi yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan bergabung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yakni meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control (Yermack, 1996).

2.1.1.7 Corporate Governance Perception Index (CGPI)

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (2010), *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah:

“*Corporate Governance Perception Index* (CGPI) adalah pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dirancang untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* (GC) melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan patok banding (*benchmarking*).”

Pelaksanaan program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang pentingnya mengetahui sejauh mana perusahaan menerapkan konsep *Good Corporate Governance*. Pada

saat ini, suatu perusahaan belum diwajibkan mengikuti program pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Walaupun demikian, perusahaan yang mengikuti program pemeringkatan CGPI mengalami peningkatan jumlah peserta setiap tahunnya. Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) merupakan alat ukur yang dimiliki oleh *Indonesian Institut For Corporate Governance* (IICG) untuk mengukur sejauh mana perusahaan menerpakan konsep *Good Corporate Governance*. (IICG, 2006).

2.1.1.8 Penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI)

The Indonesian Institut For Corporate Governance (IICG) melakukan penilaian *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) melalui empat tahap. Keempat tahap tersebut yaitu:

1. *Self assessment* (Bobot nilai 15%)

Pengisian kuesioner *Self assessment* terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif pengetahuan. Tahapan ini melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta pihak yang berkepentingan lainnya (*stakeholders*) dalam memberikan tanggapan implementasi GCG di perusahaan. Daftar responden pada tahap ini terdiri dari dua kalangan responden yakni responden internal dan responden eksternal

Responden internal terdiri dari jajaran manajemenn (Presiden Komisaris, Presiden Direktur/ Direktur Utama), Dewan Pengawas Syariah (jika perusahaan berbasis syariah), anggota Komite dibawah Dewan Komisaris dan komite eksekutif, pegawai manajerial dan pegawai non manajerial termasuk *Corporate*

Secretary, Audit Internal dan Wakil dari Serikat Pekerja. Responden eksternal terdiri dari investor institusi dan investor minoritas, lembaga pembiayaan, asuransi, asosiasi industry, regulator, mitra kerja, lembaga pemeringkat dan berbagai instansi lainnya yang berhubungan dengan perusahaan.

2. Kelengkapan Dokumen (Bobot nilai 25%)

Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif pengetahuan. Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhan dokumen terkait penerapan GCG dan praktik bisnis yang beretika serta kelengkapan system yang berlaku di perusahaan.

Dokumen yang disampaikan meliputi anggaran dasar, *board charter* untuk Dewan Komisaris, *Code of Conduct*, *Annual Report*, *Internal Audit Charter*, Prospektus, *Public Expose*, dan berbagai dokumen lainnya yang sesuai atau relevan dalam penilaian terhadap perusahaan.

3. Penyusunan Makalah dan Presentasi (Bobot nilai 12%)

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan tentang kebijakan dan kegiatan perusahaan terkait *Good Corporate Governance* (GCG) dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah ditentukan. Uraian makalah menggambarkan arah dan focus penilaian yang sesuai dengan pedoman sistematika penulisan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar, penulisan harus memenuhi criteria teknis yakni sesuai dengan format penulisan serta memenuhi sistematika penulisan yang terdiri dari cover, lembar pengesahan dan isi. Untuk isi, makalah disusun dengan urutan-

urutan yang diawali dengan abstrak yang memuat uraian ringkas terhadap isi makalah, kemudian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, kemudian pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, sasaran dan manfaat. Setelah bagian pendahuluan adalah babutama yang menjelaskan pokok permasalahan sesuai dengan penilaian dari CGPI, kemudian bagian hasil yang dicapai dan ditutup dengan bagian penutup yang berupa kesimpulan dari makalah tersebut.

4. Observasi (Bobot nilai 48%)

Tahap observasi merupakan tahap klarifikasi dan konfirmasi data dan informasi seputar penilaian melalui diskusi dan kunjungan ke perusahaan. Diskusi observasi melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan pimpinan manajerial perusahaann.

Tujuan peninjauan langsung oleh tim penilaian CGPI untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan serangkaian program pelaksanaan GCG, pelaksanaan observasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi (Tanya jawab) dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Selain itu tim penilai dapat melakukan verifikasi data-data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penilaian CGPI yang lebih akurat.

Peningkatan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) disusun berdasarkan kategori tingkat kepercayaan dengan selang nilai yang telah ditetapkan. Adapun hasil pemeringkatan tersebut dibagi kedalam tiga kategori berikut:

1. Sangat Terpercaya, rentang nilai 85 – 100

2. Terpercaya, rentang nilai 70 – 84
3. Cukup Terpercaya, rentang nilai 55 – 69

Setelah melakukan penilaian terhadap perusahaan yang mengikuti program *Corporate Governance Perception Index*, pihak *The Indonesian Institut For Corporate Governance (IICG)* akan mempublikasikan hasil penilaian dan pemeringkatann *Corporate Governance Perceptionn Index* tersebut. Hasil dari pemeringkatan tersebut akan dipublikasikan melalui saluran berikut ini:

1. Penghargaan *CGPI Awards (Indonesia Most Trusted Companies)*.
2. Pemaparan hasil pemeringkatan *CGPI* dan Majalah *SWA* dalam Sajian Utama.
3. Pemapran hasil pemeringkatan *CGPI* di Laporan *CGPI* yang diterbitkan *IICG*.
4. Pemaparan hasil pemeringkatan *CGPI* setiap perusahaan pada Laporan Hasil Riset Perusahaan peserta *CGPI*.
5. Publikasi hasil pemeringkatan *CGPI* pada *website IICG* dan *SWA*.

2.1.2 Kinerja Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturanaturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, selain itu kinerja keuangan pada dasarnya berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya, efektivitas dan efisiensi sumber

daya yang digunakan pada suatu periode tertentu. Banyak para ahli yang mengemukakan penjelasan dari kinerja keuangan, berikut ini penjelasan kinerja keuangan menurut para ahli :

Menurut Mulyadi (2007:2):

“Kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional, struktur organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Sedangkan menurut Fahmi (2012:2) :

“Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan merupakan analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.”

Kemudian pengertian kinerja keuangan Menurut Sukhemi (2007:23) :

“Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut”.

Kinerja keuangan menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan karena mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Untuk itu perlunya kita mengetahui pengertian dari kinerja keuangan itu sendiri.

Jadi kesimpulannya, kinerja keuangan adalah suatu tampilan tentang kondisi financial perusahaan selama periode waktu tertentu. Dimana untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data-data non keuangan lain yang bersifat sebagai penunjang. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber dana yang ada. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik, laporan berupa neraca, rugi laba, arus kas, dan perubahan modal yang dapat memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan.

2.1.2.2 Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan oleh seorang profesional yang menyajikan laporan dalam bentuk rasio yang menggunakan informasi sebagaimana tersaji dalam laporan keuangan. Analisis keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha, stabilitas, profitabilitas dari suatu usaha, sub usaha ataupun proyek. Laporan ini biasanya disajikan kepada pimpinan puncak suatu usaha sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini maka manajemen dapat memutuskan berbagai keputusan manajemen misalnya :

- Melanjutkan atau tidak melanjutkan operasional suatu usaha atau bagian dari suatu usaha.
- Melakukan pembuatan atau pembelian bahan baku dalam proses produksi.
- Melakukan pembelian atau menyewa mesin-mesin produksi.

- Melakukan penerbitan saham atau melakukan negosiasi untuk memperoleh pinjaman bank guna meningkatkan modal kerja perseroan.
- Berbagai keputusan lainnya yang memungkinkan manajemen melakukan pilihan yang tepat terhadap berbagai alternatif yang ada dalam mengelola perusahaan.

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat banyak sekali analisis. Analisis laporan keuangan bertujuan antara lain, untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan, untuk mengetahui perkembangan perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya, sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional dan penyusunan rencana kerja anggaran, untuk memonitor pelaksanaan dari suatu kebijakan perusahaan yang telah diterapkan, sehingga dapat diadakan perbaikan atau penyempurnaan dimasa yang akan datang dan sebagainya.

Menurut Bastian (2006:284) Metode analisis laporan keuangan yang lazim dipergunakan antara lain:

- Analisis Varians
- Analisis Komparatif
- Analisis Lingkungan
- Analisis Rasio

Berikut ini adalah uraian dari metode analisis laporan keuangan :

1. Analisis varians (variance analysis), yaitu metode analisis yang dipergunakan untuk mengetahui pencapaian kinerja dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi terjadinya deviasi.

2. Analisis komparatif (*comparative analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan keragaman usaha bank pada suatu periode dengan periode lainnya, baik secara absolut maupun relatif atas total/bagian tertentu.
3. Analisis lingkungan (*environment analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil usaha yang telah dicapai suatu unit kerja terhadap industri usaha yang sama di wilayah kerjanya.
4. Analisis rasio (*ratio analysis*), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos tertentu dalam neraca maupun laba rugi

Banyak analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, menurut Ruddy Tri Santoso (2001:87):

“Salah satu analisis yang digunakan adalah analisis rasio. Hal ini dikarenakan, analisis rasio merupakan teknik analisis yang sering dipakai karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. “

Masing-masing rasio tersebut mempunyai kegunaanya tergantung posisi keuangan yang akan dilihat. Analisis rasio keuangan sangat diperlukan bagi penilaian prestasi suatu usaha yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan, terutama bagi manajemen dalam penyusunan kebijakan Analisis rasio tersebut diharapkan sangat membantu dalam mengadakan analisis kondisi intern pada umumnya.

Berdasarkan analisis rasio keuangan akan didapat informasi yang lebih mudah dibaca dan ditaksirkan daripada laporan keuangan, juga dapat diketahui

bagaimana perkembangan aktivitas perusahaan sebagai cerminan kinerja manajemen di masa lalu, di masa sekarang dan untuk kecenderungannya di masa yang akan datang berdasarkan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan. Jenis-jenis analisis laporan keuangan yang digunakan pun bermacam-macam sesuai dengan kondisi perusahaan, secara umum ada lima analisis rasio yang biasanya digunakan, yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas.

Analisis rasio menurut Menurut Munawir (2010:106) mengenai definisi rasio keuangan yaitu:

“Analisis rasio keuangan adalah *Future oriented* atau berorientasi dengan masa depan, artinya bahwa dengan analisa rasio keuangan bias digunakan sebagai alat untuk meramalkan keadaan keuangan serta hasil usaha dimasa mendatang. Dengan angka-angka historis atau kalo memungkinkan dengan angka rasio industri (yang dilengkapi dengan data lainnya) bias digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan yang diproyeksikan yang merupakan salah satu bentuk perencanaan keuangan perusahaan.”

Sedangkan menurut Horne (2012:104) yaitu:

“Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.”

Kesimpulannya analisis rasio adalah suatu perhitungan yang dilakukan dengan membandingkan dan menjelaskan hubungan antara dua data laporan keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu yang dinyatakan dalam arithmatical terms, dimana data yang dibandingkan adalah data yang berasal dari laporan keuangan baik neraca, laporan rugi laba, maupun perubahan modal.

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakan rasio keuangan Fahmi (2011: 47), yaitu :

- a. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
- b. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
- c. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
- d. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditur dapat digunakan untuk memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan 42 adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
- e. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak stockholder organisasi.

Jenis-jenis analisis rasio yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja keuangan antara lain:

1. Analisa Likuiditas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dapat dihitung berdasarkan informasi modal kerja pos-pos aktiva lancar dan hutang lancar. Beberapa jenis rasio likuiditas antara lain:

- a. *Current Ratio*

Current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumus untuk menghitung current rasio adalah sebagai berikut :

$$\text{Current Ratio} = \text{Aktiva Lancar} / \text{Kewajiban Lancar}$$

- b. *Cash Ratio atau Ratio of Immediate Solvency*

Cash Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan

aktiva lancar yang lebih liquid (*liquid assets*). Rumusannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = (\text{Kas} + \text{Efek}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

c. *Quick Ratio* atau *Acid Test Ratio*

Quick Ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban yang harus segera dipenuhi dengan 43 aktiva lancar yang lebih liquid (*liquid assets*), rumus quick ratio adalah sebagai berikut :

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Kas} + \text{Efek} + \text{Piutang}) / \text{Kewajiban Lancar}$$

2. Analisis rasio Solvabilitas atau Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar. Data yang dipergunakan untuk analisis leverage adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi. Rasio Leverage diantaranya adalah :

a. *Total Debt to Equity Ratio*

Ratio ini digunakan untuk mengukur bagian modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau hutang.

Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut :

$$\text{TD Equity} = (\text{Hut. Lancar} + \text{Hut. Jangka Panjang}) / \text{Jumlah Modal Sendiri}$$

b. *Total Debt To Total Capital Assets*

Ratio ini digunakan untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban atau hutang. Rumusnya sebagai berikut :

$$TD\ Capital\ Assets = \frac{(Aktiva\ Lancar + Hutang\ Jangka\ Panjang)}{Jml\ Aktiva}$$

3. Analisis rasio aktivitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumberdaya yang dimiliki.

Rasio Aktivitas diantaranya adalah :

a. *Total Assets Turnover*

Total Assets Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva yang berputar pada suatu periode atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan “*revenue*”. Rumusnya sebagai berikut :

$$Total\ Assets\ Turnover = \frac{Penjualan\ Bersih}{Total\ Aktiva}$$

b. *Receivable Turnover*

Receivable Turnover digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana yang tertanam dalam piutang yang berputar pada suatu periode tertentu. Rumusnya sebagai berikut : *Receivable Turnover* = $\frac{Penjualan\ Kredit}{Piutang\ Rata-rata}$

4. Analisis rasio profitabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio

Profitabilitas atau disebut juga dengan istilah Rentabilitas diantaranya adalah:

- a. Analisis *Return on Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu :

$$\text{Return on Equity} = \text{Laba Setelah Pajak} / \text{Modal Sendiri.}$$

- b. Analisis Rasio *Return on Asset* (ROA), adalah analisi yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih.

Rumusnya yaitu :

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Jumlah Aktiva}$$

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis profitabilitas, menurut Agus (2010:119) mendefinisikan:

“Profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva produktif maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas Profit Margin, Basic Earning Power, Return On Assets, dan Return On Equity.”

Tingkat profitabilitas digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, hal ini dilakukan mengingat daya tarik bisnis (business attractiveness) merupakan salah satu indikator penting dalam persaingan usaha, sedangkan indikator daya tarik bisnis dapat diukur dari profitabilitas usaha, seperti

ROA, ROE dan NPM. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk masuk dalam dunia usaha, sehingga pada kondisi persaingan tersebut akan membuat rate of return cenderung mengarah pada keseimbangan. Daya tarik bisnis yang semakin tinggi akan mendorong pendatang baru untuk masuk dalam dunia usaha sehingga laba abnormal lambat laun akan kembali menurun menuju laba normal.

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas 46 pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja perusahaan semakin baik. Rasio yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja manajemen meningkat dalam mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba bersih (profitabilitas meningkat).

2.1.2.3 Tahap-Tahap Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Tahap-tahap analisis kinerja adalah suatu tata aturan yang sistematis yang dilakukan oleh perusahaan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis rasio keuangan perusahaan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh perusahaan, dimana tahap-tahap tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan agar hasil yang diinginkan dan diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai, mengenai keakuratan data analisis dan hasil analisis nantinya. Adapun tahap-tahap dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan.

menurut Fahmi (2011: 2), ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh. Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut 47 kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lain. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua, yaitu :
 - a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antarwaktu atau periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami perusahaan tersebut
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan. Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan aturanaturan dalam manajemen perusahaan yang baik dan benar.

2.1.2.4 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Keuangan

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2010:31) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Menurut Harahap (2008:219), mendefinisikan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.”

Menurut Munawir (2012:33), mengatakan hal yang senada mengenai profitabilitas, yaitu:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu.”

Sedangkan, definisi profitabilitas menurut Brigham dan Houston (2006:107) adalah sebagai berikut:

“Profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Profitabilitas dapat ditetapkan dengan menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur tersebut adalah dengan rasio keuangan sebagai salah satu analisa dalam menganalisa kondisi keuangan, hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu perusahaan.”

2.1.3.2 Pengertian Rasio Profitabilitas

Laba yang dicapai sesuai target dapat memberikan kesejahteraan bagi *stakeholders*, dapat meningkatkan mutu produk, serta dapat digunakan untuk melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio profitabilitas (Kasmir, 2014:196).

Menurut Fahmi (2012:135), rasio profitabilitas adalah:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi”.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Raharjaputra (2009:205) yang mengatakan bahwa:

“Rasio profitabilitas perusahaan yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas penjualan, asset bersih perusahaan, maupun modal sendiri (*shareholders equity*).”

Kasmir (2014:196), menjelaskan bahwa hasil pengukuran dapat dijadikan sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.

Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan istilah rentabilitas diantaranya adalah :

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

GPM menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rumus perhitungan GPM adalah sebagai berikut:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

[(Syamsuddin,2009:61), (Kasmir, 2014:199), dan (Gitman, 2008:67)]

GPM merupakan ukuran efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka GPM akan menurun, begitu juga sebaliknya. Semakin besar rasio GPM, maka semakin baik keadaan operasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa *cost of good sold* relative rendah dibandingkan dengan penjualan. Sebaliknya, semakin rendah GPM, semakin kurang baik operasi perusahaan (Gitman, 2008:67).

2. *Operating Profit Margin (OPM)*

OPM menggambarkan “*Pure Profit*” yang diterima atas setiap rupiah dan penjualan yang dilakukan. Menurut Syamsuddin (2009:61), jumlah dalam

OPM ini dikatakan murni (*pure*) karena benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban pemerintah berupa pajak. Gitman (2008:65) juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa OPM mengukur persentase dari setiap penjualan yang tersisa setelah semua biaya dan beban selain bunga, pajak, dan dividen saham preferen. Semakin tinggi rasio OPM, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. OPM dihitung dengan rumus:

$$OPM = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

[(Syamsuddin, 2009:61) dan (Gitman, 2008:67)]

3. *Net Profit Margin* (NPM)

NPM adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. NPM sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Jika suatu perusahaan menurunkan beban relatifnya terhadap penjualan maka perusahaan tentu akan mempunyai lebih banyak dana untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya (Gitman, 2008:67). Semakin tinggi NPM, maka semakin baik operasi perusahaan. NPM dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

[(Syamsuddin, 2009:62), (Gitman, 2008:67), dan (Brigham dan Houston, 2006:107)]

4. Tingkat Penghasilan Bagi Pemegang Saham Biasa (*Return on Common Stock Equity*)

Return on Common Stock Equity ini menyangkut tingkat penghasilan atau *return* yang diperoleh atas nilai buku saham biasa. Pihak yang sangat berkepentingan dengan rasio ini tentu saja para pemegang saham biasa, karena hal ini akan menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik perusahaan yang dalam hal ini pemegang saham biasa (Syamsuddin, 2009:65). Rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

Tingkat Penghasilan Bagi Pemegang Saham Biasa

$$= \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak} - \text{Dividen Preferen}}{\text{Modal Sendiri} - \text{Modal Saham Preferen}}$$

(Syamsuddin, 2002:66)

5. Pendapatan per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share* atau EPS)

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba. Para calon pemegang saham tertarik dengan RPS yang besar, karena hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Laba per lembar saham biasa dibagi dengan jumlah rata-rata

saham biasa yang beredar. Syamsuddin (2009:66), Kasmir (2014:207) dan Gitman (2008:68) mengatakan bahwa RPS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Lembar Saham Biasa yang Beredar}}$$

6. *Basic Earning Power* (BEP)

Rasio ini menunjukkan kemampuan asset yang dimiliki untuk menghasilkan tingkat pengembalian atau pendapatan dari aktiva perusahaan sebelum pengaruh pajak dan *leverage*. Hal ini sangat berguna untuk membandingkan perusahaan dengan situasi pajak yang berbeda dan tingkat *leverage* keuangan yang berbeda. Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{Rasio BEP} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

(Brigham dan Houston, 2006:107)

7. *Return On Investmen* (ROI)

ROI atau biasa disebut juga *Return on Total Assets* (ROA) meruokan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. ROI dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

[(Syamsudin, 2009:63), (Kasmir,2014:202), (Gitman,208:68), (Munawir, 2004:89), (Brigham dan Houston, 2006:109)]

ROI/ROA dapat digunakan sebagai alat ukur tingkat kesehatan kinerja keuangan sebuah perusahaan (Syamsudin, 2009:63) karena ROI dapat menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan mengendalikan biaya dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan (Gitman, 2008:68). Menurut Munawir (2004:89), besarnya ROI dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu :

“a. *Turnover dari operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).

b. *Profit margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam presentase dan jumlah penjualan bersih.”

8. *Retrun On Equity* (ROE)

ROE adalah rasio yang menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Menurut Brigham dan Houston (2006:116), para pemegang saham melakukan investasi untuk mendapatkan pengembalian atas uang mereka, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik mereka telah melakukan hal tersebut dari kacamata akuntansi.

Menurut Syamsuddin (2009:65), Kasmir (2014:204), Gitman (2008:69), dan Brigham dan Houston (2006:109), ROE dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Sesudah Pajak}}{\text{Modal}} \times 100\%$$

Indikator pengukuran kinerja keuangan perusahaan pada penelitian ini menggunakan analisis ROE (*Return on Equity*). Rasio profitabilitas dan analisis *Return on Equity* ini dipilih karena analisis ini tepat untuk melihat sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari modal sendiri, serta bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan berkelanjutan dari sebuah perusahaan (Brealey, 2008:82). Berdasarkan Departemen Koperasi dan UKM dalam riset akuntansi Alamsyah (2006), kriteria-kriteria penilaian ROE adalah sebagai berikut:

- $\geq 21\%$ nilai yang diperoleh artinya sehat.
- 10%-20% nilai yang diperoleh artinya cukup sehat.
- 1%-9% nilai yang diperoleh artinya kurang sehat.
- $< 1\%$ nilai yang diperoleh artinya tidak sehat.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan

Profitabilitas suatu perusahaan banyak di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal perusahaan maupun faktor eksternal perusahaan. Menurut Gabriela Cynthia Windah (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Komposisi kepemilikan aktiva,
2. Ukuran perusahaan,
3. Tingkat inflasi,
4. Harga jual komoditi,
5. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan,
6. Kesempatan bertumbuh perusahaan,
7. Nilai tukar kurs rupiah, serta
8. *Good Corporate Governance*.

2.1.4 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai keterkaitan kinerja keuangan (likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas) terhadap *return* saham, penulis ungkapkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Gabriela Cynthia (2013)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei <i>The Indonesian Institute Perception Governance</i> (IICG) Periode 2008-2011	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan yang menerapkan GCG dan masuk dalam <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) hasil surevei IICG	Analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variable independen GCG terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan <i>Tobin's-Q</i> , sedangkan jika diukur dengan ROE memiliki pengaruh positif yang signifikan.
2.	Arif Saripudin (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2012	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan Pertambangan Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan.
3.	Ekowati Dyah Lestari (2007)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI (2007-2009)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2011-2015	Terdapat pengaruh positif mekanisme <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan <i>return on equity</i> (ROE)

4.	Riana Christel Tumewa (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI (2009-2013)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI periode 2009-2013	GCG memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan.
5.	Melanthon Rumapea (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
6.	David Tjondro (2011)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan perbankan yang tercatat di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan.
7.	Luh Putu Ari Anjani (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas
8.	Sherly Heriyanto (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2014	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas
9	Tangguh Wicaksono (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	Variabel Terikat: Profitabilitas	Sektor yang diteliti: Perusahaan peserta	Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh

		Profitabilitas Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta <i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) Tahun 2012)	Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Corporate Governance Perception Index</i> (CGPI) tahun 2012	positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.
10	Helfina Rimardhani (2016)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
11	Sally Amanda (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2015)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa <i>good corporate governance</i> memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan di Indonesia.
12	Frans Pangabahan Pasaribu (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar Dalam BEI Tahun 2010-2012	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i> Sektor yang diteliti: Perusahaan <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> yang Terdaftar Dalam BEI Tahun 2010-2012		Hasil empiris menunjukkan bahwa secara simultan variable <i>good corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
13	Eric Tjandra (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap	Variabel Terikat: Profitabilitas	Sektor yang diteliti: Perusahaan <i>Property</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh negative

		<i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Pada Perusahaan <i>Property</i> Dan <i>Real Estate</i> Di Indonesia	Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Dan <i>Real Estate</i> Di Indonesia Variabel Terikat: <i>Leverage</i>	terhadap profitabilitas.
14	Lidia Desiana (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Profitabilitas (ROE) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2015	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Bank umum syariah di Indonesia periode 2010-2015	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel <i>good corporate governance</i> terhadap variabel profitabilitas berpengaruh positif, dan dari hasil analisis yang telah dijelaskan secara keseluruhan pada pengaruh GCG secara signifikan terhadap profitabilitas.
15	Faisal Firmansyah (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Survei pada Perusahaan yang Terdaftar di JII Periode 2011-2015)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan yang terdaftar di JII periode 2011-2015	Berdasarkan hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap variabel profitabilitas.
16	Agung Santoso Putra (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas (Survei pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>good corporate governance</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas.
17	Lidya Theresia Bangun (2014)	Analisis Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Pertambangan Terbuka Di BEI	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.
18	Diana Istighfarin (2015)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan BUMN	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

			<i>Governance</i>		
19	Beatrix Stephani Aprinita (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di BEI 2012-2014	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan sector <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, variabel <i>good corporate governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel profitabilitas.
20	Andika Lesmana (2017)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di BEI	Variabel Terikat: Profitabilitas Variabel Bebas: <i>Good Corporate Governance</i>	Sektor yang diteliti: Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014	Hasil penelitian yang di dapat di dalam penelitian ini adalah <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

2.2 Kerangka Pemikiran

Konsep *agency theory* menjelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Hardiningsih (2009), menyatakan bahwa *agency theory* merupakan teori yang mengatur hubungan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dengan *principal*. Pemegang saham disebut sebagai *prinsipal*, sedangkan manajemen perusahaan disebut *agent*. *Agent* diberikan mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal* dan *agent* itu sendiri. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan rentan terhadap konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri (Jensen & Meckling, 1976). Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kesepakatan tersebut, manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan atas kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Untuk itu, pemilik menuntut laba sebagai hasil dari kegiatan bisnis dari pihak *agent*. Oleh karena itu, manajemen harus memberikan tingkat profitabilitas yang memuaskan kepada pemilik perusahaan dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang paling tepat terhadap kegiatan operasional bisnis perusahaan sehingga berdampak positif terhadap *good corporate governance* atau tata kelola

perusahaan. *Good corporate governance* yang baik menandakan bahwa manajemen perusahaan sukses dalam melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga hal ini akan berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan, dan sebaliknya *good corporate governance* yang buruk akan berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas perusahaan.

Berjalannya hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, tak lepas dari berjalannya hubungan komunikasi informasi yang baik demi kelancaran perusahaan, sehingga *signalling theory* menjelaskan pentingnya suatu informasi (sinyal) yang dibutuhkan oleh perusahaan terutama bagi pihak *principal* dan *agent*. Teori ini menjelaskan mengapa manajemen perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan manajemen perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar karena manajemen perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar. Salah satu informasi keuangan yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan emiten yang melakukan pengumuman (Suwardjono, 2005). Perusahaan yang mempunyai keyakinan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik kedepannya akan cenderung mengkomunikasikan berita tersebut terhadap para investor dan kreditur (Hanafi, 2004). Peran *signalling theory* bagi profitabilitas adalah, pada perusahaan yang berkulitas baik nantinya

akan memberi sinyal berupa laporan keuangan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi.

Tata kelola atau *good corporate governance* suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin baik *good corporate governance* suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin buruk *good corporate governance* suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini disebabkan kepastian sebuah perusahaan dalam bagaimana mengelola segala yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Perusahaan dapat merencanakan sesuatu bagi kebutuhan perusahaan untuk jangka pendek bahkan jangka panjang. Peningkatan profitabilitas perusahaan merupakan alasan yang jelas bahwa perusahaan pantas berjalan, perusahaan dapat bertahan, bahkan perusahaan dapat maju.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Riana (2014) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan *Return On Equity* (ROE).

Sejalan dengan penelitian Gabriela (2013) menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara indeks *Good Corporate Governance* dengan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE).

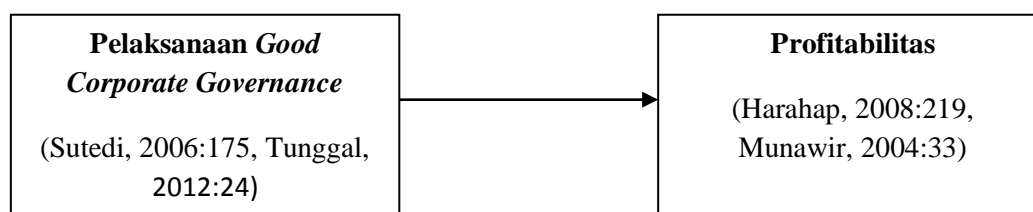
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh David Tjondro (2011) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini berarti semakin baik penerapan *Good Corporate Governance* maka akan meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROA, ROE dan NM. Maka sebaiknya perusahaan perbankan menerapkan *Good Corporate Governance* karena terbukti mampu meningkatkan kinerja finansialnya terutama kemampuan menghasilkan laba.

Serta penelitian yang dilakukan oleh Arif Saripudin (2014) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sherly Heriyanto (2016) menyimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, juga dari definisi yang telah ada, maka sampai pada pemahaman penulis bahwa penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian biasanya disusun bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan model kerangka pemikiran diatas, maka yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas perusahaan.